

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian dari tindakan peneliti dalam menganalisis perbedaan dan persamaan ataupun mengkaji riset ilmiah yang telah dilaksanakan dalam suatu topik tertentu. Beberapa hasil dari penelitian terdahulu, dicantumkan berbeda oleh peneliti dengan penjabaran ringkas mungkin. Di bawah ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema yang dikaji.

Penelitian pertama dilaksanakan oleh J. Beno, *at all* pada tahun 2022 dengan judul “Efektivitas Program SDGs Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ngabar Ponorogo”. Dalam penelitian tersebut dapat diketahui bahwa adanya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di wilayah pedesaan Indonesia, perihal kesejahteraan Masyarakat menjelaskan tujuannya untuk mengakhiri ketimpangan ekonomi serta krisis pangan. Penelitian ini memiliki tiga hasil temuan, antara lain; 1) program SDGs Desa telah diimplementasikan dengan baik sesuai dengan prioritas keperluan untuk kesejahteraan masyarakat. 2) dapat ditinjau melalui ketiga metode penilaian indeks efektivitas, antara lain proses, pendekatan sumber serta sasaran. 3) pelaksanaan program SDGs Desa untuk kesejahteraan masyarakat telah berimplikasi secara signifikan terhadap keseluruhan populasi (Beno et al., 2022).

Relevansi dari penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu, konsep inovasi atau keefektivan program yang diinisiasi oleh Pemerintah secara eksplisit ditujukan untuk penanggulangan kelaparan serta menekan angka kemiskinan guna kesejahteraan masyarakat yang merata. Perbedaan relevansi dari kajian ini ada pada pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif dan induktif.

Penelitian kedua dilaksanakan oleh S.Nurfadillah pada tahun 2019 dengan judul “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Up2k-Pkk Di Desa Kayuambon Lembang”. Dalam penelitian tersebut dapat diketahui bahwa sehubungan

dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia terkhusus pada Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang, dukungan fiskal berupa APBD dan APBN diberikan oleh pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk memberdayakan masyarakat golongan prasejahtera secara maksimal melalui inisiatif pemberdayaan yang beragam, antara lain pengembangan wilayah kecamatan, program P2KP (penanggulangan kemiskinan perkotaan), serta mencakup program UP2K (upaya peningkatan pendapatan keluarga). Hasilnya program UP2K-PKK telah cukup banyak meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kayuambon Lembang (Nurfadillah, 2019).

Relevansi dari penelitian ini memiliki persamaan yaitu, dalam penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian kualitatif. Sementara data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, serta studi dokumentasi. Perbedaan relevansi penelitian ini ada pada penggunaan jenis penelitian yaitu deskriptif, jenis penentuan subyek yang menggunakan 7 kelompok program UP2K-PKK.

Penelitian ketiga dilaksanakan oleh Meilina, *at all* pada tahun 2020 dengan judul "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Berkah Produktif dari Sampah di Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri". Dalam penelitian tersebut menggerakkan inisiatif yang ditujukan guna menumbuhkan tingkat taraf hidup masyarakat melalui aksi "berkah produktif dari sampah" di Desa Titik, Kec. Semen, Kab. Kediri. Berdasarkan gambaran situasi yang dihadapi oleh mitra PKM, implementasi program PKM telah efektif mencapai segala penyelesaian serta tujuan program, dengan meningkatkan kesadaran maupun pemahaman masyarakat mengenai pengolahan jenis-jenis sampah beserta kegunaannya, khususnya dengan populasi penduduk yang memiliki kemauan untuk mengklasifikasi sampah (Meilina et al., 2020).

Relevansi dari penelitian ini memiliki persamaan yaitu, menggerakkan program dengan konsep yang inovatif tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Perbedaan relevansi penelitian ini ada pada sasaran prioritas

masyarakatnya, tempat atau lokasi penelitian dan tujuan dari penelitian ini selain menyejahterakan, juga menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

Penelitian keempat dilaksanakan oleh T. Kurniawati, R. Kurnia pada tahun 2021 dengan judul “Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Kube Pkh Di Kabupaten Ciamis”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa KUBE-PKH merupakan salah satu proyek yang diinisiasi oleh pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan dalam bentuk kelompok korporasi yang beranggotakan kelompok masyarakat ataupun keluarga yang dibina dalam program sosial dan dikembangkan melewati tahapan tindakan PROKESOS (Program Kesejahteraan Sosial) dalam hal memperbaiki standar kesejahteraan masyarakatnya. Metode survei digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini. Dengan menunjukkan hasil bahwa: (1) Hasil program KUBE yang dilaksanakan di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Sukamantri, Kecamatan Panjalu dan Kecamatan Rajadesa yang telah mencapai indikator usaha memperbaiki taraf hidup sosial, serta (2) Hambatan dilaksanakannya KUBE-PKH mencakup ekonomi, Pendidikan, serta sumberdaya manusia (Kurniawati & Kurnia, 2021).

Relevansi dari penelitian ini memiliki persamaan dalam perihal penentuan subjek penelitian dilakukan secara sengaja menggunakan teknik *purposive sampling*. Perbedaan relevansi penelitian ini ada pada lembaga pengimplementasian program untuk kesejahteraan masyarakat dengan membentuk kelompok usaha, beranggotakan kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang sebelumnya telah mengikuti tahapan pembinaan melalui Program Kesejahteraan Sosial (PROKESOS), sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup mereka.

Penelitian kelima dilaksanakan oleh G. Rabbani, *at all* pada tahun 2021 dengan judul “**Pemberdayaan Ekonomi Melalui Program Kelompok Mingguan (PKKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**”. Dalam penelitian tersebut **berisi tentang resesi** ekonomi yang memerlukan partisipasi swasta maupun

pemerintah, termasuk PKK (Program Kredit Kelompok Mingguan), PT BPR Parahabat yang mengeluarkan produk untuk mengganggu krisis perekonomian. Temuan riset mengungkapkan bahwa mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pencapaian program PKK oleh PT BPR Parahabat, terbukti menghasilkan manfaat terutama perihal Kondisi sosial yang lebih makmur, perencanaan serta implementasi PKK sejalan mengikuti prinsip Pembangunan berbasis sosial dengan tujuan memperkuat kemandirian dan kemakmuran (Rabbani et al., 2021).

Relevansi dari penelitian ini memiliki persamaan yaitu, menggunakan metode kualitatif. Perbedaan relevansi penelitian ini ada pada lembaga yang terlibat berbeda, program ini melibatkan PT BPR Bersahabat dalam memberdayakan masyarakat dan komoditas yang diteliti dari segi ekonomi dan juga jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif.

Penelitian keenam dilaksanakan oleh I Dewantara, *at all* pada tahun 2020 dengan judul “Evaluasi Kinerja Inisiatif Manajemen Pemeliharaan Menggunakan kriteria *Malcolm Baldrige* (Suatu Pendekatan Kualitatif - Evaluatif)”. Dalam penelitian tersebut dapat diketahui bahwa kualitatif *good performance* dengan kategori kinerja manajemen proses dan tenaga kerja merupakan skor umum yang dinilai secara mandiri oleh kriteria *Malcolm Baldrige*. Untuk pencapaian lebih tinggi kualifikasi, strategi peningkatan kinerja diperlukan dalam upaya pengelolaan perawatan, guna perusahaan menjaga daya saingnya, terkhusus kompetensi dalam aspek perencanaan serta orientasi untuk konsumen (I Dewantara, M Ali, 2020).

Relevansi dari penelitian ini memiliki persamaan yaitu, menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian evaluatif untuk mengukur efektivitas ataupun pencapaian kinerja lembaga yang terlibat didalamnya. Perbedaan relevansi penelitian ini ada pada program kinerja yang dievaluasi, penelitian ini fokus pada strategi peningkatan kemampuan perencanaan untuk kepuasan pelanggan.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi
1.	J. Beno, <i>at all.</i> 2022. “Efektivitas Program SDGs Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ngabar Ponorogo”.	1) program SDGs Desa telah diimplementasikan dengan baik sesuai dengan prioritas dengan keperluan untuk kesejahteraan masyarakat. 2) dapat ditinjau melalui ketiga metode penilaian indeks efektivitas, antara lain proses, pendekatan sumber serta sasaran. 3) pelaksanaan program SDGs Desa untuk kesejahteraan masyarakat telah berimplikasi secara signifikan terhadap keseluruhan populasi	Memiliki persamaan yaitu, konsep inovasi atau keefektivan program yang diinisiasi oleh Pemerintah secara eksplisit ditujukan untuk penanggulangan kelaparan serta menekan angka kemiskinan guna kesejahteraan masyarakat yang merata. Perbedaan relevansi dari kajian ini ada pada pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif dan induktif.
2.	S.Nurfadillah. 2019. “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Up2k-Pkk Di Desa Kayuambon Lembang”.	Dengan adanya skema UP2K-PKK yang diinisiasi oleh pemerintah telah cukup banyak meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kayuambon Lembang	Memiliki persamaan yaitu, dalam penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian kualitatif. Sementara data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, serta studi dokumentasi. Perbedaan relevansi penelitian ini ada pada penggunaan jenis penelitian yaitu deskriptif, jenis penentuan subyek yang menggunakan 7 kelompok program UP2K-PKK
3.	Meilina, <i>at all.</i> 2020. “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Berkah Produktif Dari Sampah Di Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri”.	Implementasi program PKM telah efektif mencapai segala penyelesaian serta tujuan program, dengan meningkatkan kesadaran maupun pemahaman masyarakat mengenai pengolahan jenis-jenis sampah beserta kegunaannya, khususnya dengan populasi penduduk yang memiliki kemauan untuk mengklasifikasi sampah.	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu, menggerakkan program dengan konsep yang inovatif tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Perbedaan relevansi penelitian ini ada pada sasaran prioritas masyarakatnya, tempat atau lokasi penelitian dan tujuan dari penelitian ini selain menyejahterakan, juga menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

4.	T. Kurniawati, R. Kurnia. 2021. "Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Kube Pkh Di Kabupaten Ciamis".	(1) Hasil program KUBE yang dilaksanakan di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Sukamantri, Kecamatan Panjalu dan Kecamatan Rajadesa yang telah mencapai indikator usaha memperbaiki taraf hidup sosial, serta (2) Hambatan dilaksanakannya KUBE-PKH mencakup ekonomi, Pendidikan, serta sumberdaya manusia.	Memiliki persamaan dalam perihal penentuan subjek penelitian dilakukan secara sengaja menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Perbedaan relevansi penelitian ini ada pada lembaga pengimplementasian program untuk kesejahteraan masyarakat dengan membentuk kelompok usaha, beranggotakan kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang sebelumnya telah mengikuti tahapan pembinaan melalui Program Kesejahteraan Sosial (PROKESOS), sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup mereka.
5.	G. Rabbani, <i>at all.</i> 2021. " <b>Pemberdayaan Ekonomi Melalui Program Kelompok Minggu (PKKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</b> ".	Mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pencapaian program PKKMM oleh PT BPR Parasahabat, terbukti menghasilkan manfaat terutama perihal Kondisi sosial yang lebih makmur, perencanaan serta implementasi PKKMM sejalan mengikuti prinsip Pembangunan berbasis sosial dengan tujuan memperkuat kemandirian dan kemakmuran.	Memiliki persamaan yaitu, menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Perbedaan relevansi penelitian ini ada pada lembaga yang terlibat berbeda, program ini melibatkan PT BPR Bersahabat dalam memberdayakan masyarakat dan komoditas yang diteliti dari segi ekonomi dan juga jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif.
6.	I Dewantara, <i>at all.</i> 2020. "Evaluasi Kinerja Inisiatif Manajemen Pemeliharaan Menggunakan Kriteria <i>Malcolm Baldrige</i> (Suatu Pendekatan Kualitatif Evaluatif)".	Kualitatif <i>good performance</i> dengan kategori kinerja manajemen proses dan tenaga kerja merupakan skor umum yang dinilai secara mandiri oleh kriteria <i>Malcolm Baldrige</i> . Untuk pencapaian lebih tinggi kualifikasi, strategi peningkatan kinerja diperlukan dalam upaya pengelolaan perawatan, guna perusahaan menjaga	Memiliki persamaan yaitu, menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian evaluatif untuk mengukur efektivitas ataupun pencapaian kinerja lembaga yang terlibat didalamnya. Perbedaan relevansi penelitian ini ada pada program kinerja yang dievaluasi, penelitian ini fokus pada strategi peningkatan kemampuan perencanaan untuk kepuasan pelanggan.

		<p>daya saingnya, terkhusus kompetensi dalam aspek perencanaan serta orientasi untuk konsumen.</p>	
--	--	--	--

## 2.2 Kajian Pustaka

### 2.2.1 Efektivitas Pelaksanaan

Kesuksesan sebuah program dalam mewujudkan orientasi terencana dapat didefinisikan sebagai efektivitas. Keefektifan sebuah program dapat dirasakan, jika orientasi dari program tersebut terealisasi dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Efektivitas menjadi patokan untuk menilai perbandingan dari segi perencanaan maupun prosedur dengan hasil capaian. Oleh karena itu, ukuran efektivitas diperlukan untuk menentukan apakah suatu program telah terlaksana dengan efektif (Simamora et al., 2024).

Efektivitas pelaksanaan merujuk pada seberapa besar program merealisasikan orientasi yang ditetapkan. Konsep semacam ini sering digunakan dalam konteks organisasi maupun manajemen untuk menilai keberhasilan suatu program atau kebijakan. Selain itu, dalam konteks kebijakan publik, “Manajemen Kinerja Sektor Publik” (Mahmudi, 2019), menjelaskan bahwa efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan publik dapat diukur dari kemampuan suatu program apakah memenuhi target berdasarkan perencanaan yang telah ditentukan.

### 2.2.2 Bantuan Sosial

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011, menyatakan bahwa bantuan sosial adalah bantuan berupa finansial maupun sembako yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, maupun masyarakat yang bersifat selektif (Iqbal, 2022). Berikut merupakan beragam jenis bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat.

- 1) Program Keluarga Harapan (PKH), berupa program pengentasan kemiskinan dengan memberikan dana langsung dan diberikan melalui *e-wallet* ataupun rekening bank yang dibuat khusus untuk masyarakat penerima PKH. Tujuan program ini diinisiasi oleh pemerintah ialah guna mengoptimalkan taraf hidup dengan fokus pada bidang Pendidikan dan layanan kesehatan (Risna Resnawaty, 2017).
- 2) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), ialah penyaluran program oleh pemerintah kepada masyarakat prasejahtera (kurang mampu) serta telah terdaftar dalam data PKH (Program Keluarga Harapan) maupun PKM (Keluarga Penerima Manfaat) per bulannya. Masyarakat yang terdaftar hanya dapat menggunakan akun atau kartu elektronik yang digunakan untuk berbelanja kebutuhan bahan pangan mereka pada penjual bahan pangan yang telah disertifikasi serta bermitra dengan Bank Indonesia (Julianto, 2020).
- 3) Bantuan Sosial Tunai (BST), sebuah upaya Pemerintah Indonesia dalam memberikan bantuan kepada warga negara yang terpengaruh krisis ekonomi serta tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bertujuan meringankan beban ekonomi, meningkatkan daya beli dan juga mencegah kemiskinan. Program bantuan disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos), Bank HIMBARA (BNI, BRI, BTN dan Mandiri) serta PT. Pos Indonesia.
- 4) Pemberian Bantuan Iuran (PBI), merupakan program pelayanan medis dasar dan tingkat lanjutan, meliputi medikasi, rawat jalan dan rawat inap yang diberikan oleh pemerintah dengan jaminan yang ditujukan khusus untuk masyarakat Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan. Program ini dikelola oleh BPJS Kesehatan dan dibiayai oleh Pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan.

- 5) Kartu Prakerja, program ini diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 2020 yang memiliki tujuan mengembangkan potensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing dalam ketenaga kerjaan, serta mendorong kewirausahaan ditengah-tengah masyarakat.

### **2.2.3 Program Bantuan Lauk Pauk**

Pelaksanaan program bantuan lauk pauk bagi masyarakat prasejahtera, termasuk dalam kategori bantuan permakanan yang bisa disalurkan dalam bentuk tunai maupun non tunai tergantung pada pengimplementasiannya. Program ini terarah untuk menyama ratakan kesejahteraan masyarakat dalam suatu desa maupun daerah. Setidaknya dapat terpenuhi kebutuhan mereka untuk sehari-hari. Dengan kata lain bahwa Pemerintah Desa, Daerah maupun Pusat berkontribusi dalam jalannya pengimplementasian program-program bantuan yang berinovatif untuk menyejahterakan masyarakat. Program bantuan sosial semacam ini bertujuan mengurangi tekanan masyarakat golongan prasejahtera dengan pemberian bantuan pangan berupa dana bantuan, sembako ataupun bahan pangan (bantuan pangan non tunai).

Dalam rangka peningkatan efektivitas pengelolaan program bantuan yang inovatif seperti bantuan lauk pauk, penting untuk menyinkronkan dan koordinasi antara semua instansi yang terlibat, mulai dari tingkat Pusat, Daerah maupun Desa yang dimulai dari tahapan penyusunan sampai pelaksanaannya, dengan menyertakan berbagai elemen masyarakat, serta pihak-pihak terkait. Program bantuan lauk pauk yang diberikan oleh Pemerintah Desa Junrejo secara langsung melibatkan unsur masyarakat seperti RT/RW, masyarakat penerima bantuan dan pedagang sayur (UMKM) (SAA Santoso, S Muchsin, 2024).

### **2.2.4 Masyarakat Sejahtera**

Dapat dikatakan sebagai masyarakat sejahtera jika mereka ada dalam kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar, mempunyai akses layanan dasar, dan

pengembangan kualitas hidup secara layak. Todaro dan Smith (2004), mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat mengacu pada tingkatan kepuasan pada kebutuhan dasar, contohnya ialah kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan serta perawatan medis (kesehatan). Kata lain kesejahteraan sosial dapat diartikan dengan optimalnya penggunaan masing-masing individu terhadap sumber daya yang tersedia dengan memperhatikan kondisi dan keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual mereka.

### **2.2.5 Masyarakat Prasejahtera**

Disebut sebagai masyarakat prasejahtera karena mereka termasuk kelompok sosial yang menghadapi keterbatasan dalam mencukupi keperluan dasar hidup mereka, penyebabnya ada salah satu faktor umum, yaitu minimnya pemasukan tiap bulan yang tidak selaras dengan meningkatnya biaya kebutuhan hidup yang esensial. Kelompok dengan golongan ini masih sangat memerlukan dukungan pemerintah dalam beragam aspek kebutuhan hidup mereka, seperti subsidi pangan, akses gratis ke pendidikan dasar dan layanan kesehatan (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024 mengategorikan masyarakat prasejahtera ialah masyarakat dengan pengeluaran berada di bawah level kesejahteraan minimum yang telah diputuskan pada bulan Maret sebesar Rp 582.932 setiap individu per bulannya. Berikut merupakan indikator lain yang memperkuat kategori masyarakat prasejahtera menurut BPS (2020).

- 1) Luas hunian dengan ukuran dibawah 8m<sup>2</sup>/ individu.
- 2) Lantai berbahan dasar dari bambu/ kayu kualitas rendah/ tanah.
- 3) Hunian berdinding rumbia/ bambu/ kayu berkualitas rendah ataupun dinding belum dilapisi plester.
- 4) Tidak tersedia fasilitas toilet sendiri atau berbagi dengan keluarga lain.
- 5) Energi listrik tidak dipergunakan untuk penerangan.

- 6) Air yang dikonsumsi diperoleh dari sungai/ sumur/ mata air tidak terproteksi/ air hujan.
- 7) Memasak menggunakan arang/ kayu/ minyak tanah sebagai bahan bakar.
- 8) Pangan protein seperti susu/ daging/ ayam hanya dikonsumsi sekali dalam seminggu.
- 9) Hanya satu stel busana baru yang dibelanjakan dalam setahun.
- 10) Hanya satu/ dua kali makan per hari.
- 11) Tidak mampu membawa anggota keluarga ke tempat atau fasilitas kesehatan saat sakit.
- 12) Kepala rumah tangga bersumber penghasilan, antara lain: buruh bangunan, buruh tani, petani yang memiliki lahan seluas 0,5 ha, nelayan, buruh perkebunan ataupun profesi lainnya yang bulannya berpenghasilan dibawah Rp 600.000.
- 13) Kepala keluarga berpendidikan rendah (hanya SD/ tidak tamat SD/ tidak sekolah).
- 14) Tidak mempunyai aset atau barang yang dapat dipindah tangankan dengan nilai minimal Rp 500.000.

### **2.3 Landasan Teori**

Paradigma merupakan kerangka pemikiran paling mendasar yang terdiri dari gabungan konsep dan teori yang berguna untuk memahami, menjelaskan serta menafsirkan fenomena sosial. Dalam “Paradigma Penelitian Ilmu-Ilmu Humaniora” (Ahimsa-Putra, 2009), paradigma memungkinkan untuk membantu kita dalam memandang maupun menganalisis presisi sosial melalui sistem pemikiran tertentu. Dalam penelitian ini, menggunakan paradigma sistem sosial dengan melihat masyarakat dari perspektif fungsionalisme struktural, artinya pendekatan ini menganggap masyarakat sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen yang berkolerasi dan saling mendukung untuk menjaga stabilitas. Talcott Parsons, berasumsi

bahwa setiap elemen dalam masyarakat mempunyai fungsi tertentu yang berkontribusi dalam kelangsungan sistem secara menyeluruh.

Dalam “*The Social System*” (Parsons, 1951), membahas mengenai sistem sosial terdiri dari banyaknya subsistem yang berinteraksi dengan moralitas serta nilai-nilai yang disepakati bersama sebagai faktor utama dalam menciptakan kohesi sosial. Parsons, berpendapat bahwa moralitas berperan penting dalam integrasi sosial, yaitu dengan menjaga keseimbangan antar individu maupun kelompok dalam masyarakat, seperti penekanan Emile Durkheim, dalam solidaritas mekanik dan organik. Selain itu, Parsons juga menjelaskan bahwa prasyarat atau imperatif agar sistem tetap bertahan harus mempunyai empat kriteria, yaitu *adaptation*, *goal attainment*, *integration and latency* (AGIL) dengan penjabaran sebagai berikut.

1. *Adaptation* (Adaptasi)

Penyesuaian diri suatu sistem dengan lingkungan eksternal dan juga mengelola sumber daya untuk bertahan. Adaptasi yang dimaksud meliputi interaksi antara sistem sosial dengan lingkungannya, baik perihal ekonomi, ekologi maupun teknologi.

2. *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan)

Fungsi ini memiliki keterkaitan dengan pengambilan keputusan dan tata kelola kekuasaan dalam masyarakat, artinya sistem harus mempunyai mekanismenya untuk menentukan serta menjangkau tujuan kolektif.

3. *Integration* (Integrasi)

Sistem harus mempunyai prosedur untuk mengoordinasikan elemen-elemen sosial serta menjaga kohesi sosial. Integrasi juga memastikan bahwa norma, aturan sosial dan nilai diimplementasikan secara efektif, sehingga dapat mengurangi konflik dalam masyarakat.

4. *Latency* (Pemeliharaan Pola)

Skema ini memiliki keterkaitan dengan proses sosialisasi dan internalisasi nilai dalam masyarakat, artinya sistem sosial memiliki fungsi yang berperan

menjaga serta meneruskan pola-pola nilai dan norma yang diperlukan, agar sistem sosial dapat berjalan dengan baik dan tetap stabil.

Fokus dari skema AGIL ialah membahas mengenai bagaimana institusi sosial bertugas mempertahankan solidaritas serta integrasi sosial di masyarakat. Perihal program bantuan sosial, teori sistem dan prasyarat bertahannya sistem (AGIL) bisa digunakan untuk mengamati bagaimana program tersebut berfungsi dalam mempertahankan integrasi sosial, menjaga kestabilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat prasejahtera guna mencegah ketidakstabilan sosial dan memperbaiki ketimpangan sosial.

Program bantuan sosial berupa bantuan lauk pauk bagi masyarakat prasejahtera yang diinisiasi oleh Pemerintah Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu dapat dipahami melalui teori sistem dan prasyarat bertahannya sistem dengan kriteria AGIL yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Dalam perspektif fungsionalisme struktural, program semacam ini dapat dinilai sebagai salah satu fungsi sosial yang memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan, ketertiban serta stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks kesejahteraan masyarakat, teori ini berpendapat bahwa kesejahteraan dapat dicapai melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kebutuhan akan sandang, pangan, papan, air bersih, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.